

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan sistem demokrasi tersebut adalah melalui mekanisme pemilihan umum (Pemilu) yang dilakukan secara langsung oleh rakyat<sup>1</sup>. Pemilu ini menjadi sarana bagi rakyat untuk memilih para wakil dan pemimpin mereka, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. Prinsip pemilihan langsung ini merupakan perwujudan dari amanat konstitusi yang tercantum dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini secara tegas mengatur bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Ketentuan ini menegaskan bahwa rakyat memiliki hak untuk menentukan masa depan politik bangsa melalui partisipasi aktif dalam pemilu, yang sekaligus menjadi tolok ukur utama dalam menjalankan demokrasi di Indonesia<sup>2</sup>.

Pemilu merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan dengan suksesi peraturan pemerintahan yang demokratis<sup>3</sup>. Indonesia dikenal

---

<sup>1</sup> Galih Puji Mulyono, Rizal Fatoni, and Universitas Merdeka Malang, "Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah Di Indonesia," 2019, <http://e-journal.unipms.ac.id/index.php/citizenship>.

<sup>2</sup> Felani Ahmad Cerdas And Hernadi Afandi, "Jaminan Perlindungan Hak Pilih Dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara Dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019)," *Sasi* 25, No. 1 (2019): 72, <https://doi.org/10.47268/Sasi.V25i1.142>.

<sup>3</sup> Nurhayu Handayani Putri, Aturkian Laia, And Bestari Laia, "Sistem Proporsional Pemilihan Umum Dalam Perspektif Politik Hukum," *Jurnal Panah Keadilan* 2, No. 2 (2023): 66–80.

sebagai negara dengan sistem pemerintahan demokratis dengan kekuasaan yang berada di bawah kendali rakyat dan diimplementasikan melalui mekanisme perwakilan. Demokrasi di Indonesia mulai berkembang pesat dari pasca reformasi.

Pemilu berfungsi sebagai mekanisme utama untuk menentukan siapa yang akan memimpin pemerintahan dan membuat keputusan penting yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Melalui Pemilu, rakyat memiliki kesempatan untuk mengekspresikan kehendak mereka secara langsung dalam memilih wakil-wakil mereka yang akan menduduki posisi strategis di pemerintahan. Pemilu diadakan secara berkala dan diatur oleh undang-undang atau konstitusi untuk memastikan transparansi, keadilan dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Dengan tujuan dari penyelenggaraan pemilu, memastikan bahwa pemerintahan yang terbentuk mencerminkan kehendak mayoritas rakyat<sup>4</sup>. Pemilu tidak hanya menjadi sarana demokrasi, tetapi juga wadah partisipasi politik masyarakat untuk mewujudkan aspirasi mereka dalam sistem pemerintahan. Hasil dari pemilu memberikan legitimasi kepada pemerintah yang terpilih dan menjadi dasar bagi pelaksanaan kebijakan publik.

Sebagai lembaga yang diberi amanah untuk menyelenggarakan pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum beserta KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertekad kuat untuk mensukseskan setiap tahapan pemilihan agar hasilnya dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Keberhasilan

---

<sup>4</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Kencana Prenadamedia Group, 2018).

penyelenggaraan pemilihan merupakan tujuan utama bagi KPU dan jajarannya, di mana hal tersebut dapat dicapai dengan memastikan ketaatan terhadap pelaksanaan seluruh rangkaian tugas sesuai dengan asas-asas pemilu yang telah diamanatkan, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam rangka menjaga integritas dan kualitas penyelenggaraan pemilihan, KPU juga senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip mandiri, berkepastian hukum, tertib, akuntabel, efektif, efisien, serta menjunjung tinggi aspek aksesibilitas bagi seluruh masyarakat<sup>5</sup>.

Melalui penerapan prinsip-prinsip ini, KPU berupaya untuk menjamin bahwa setiap proses pemilihan berjalan sesuai dengan standar hukum dan demokrasi, sehingga kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan dapat terwujud. Upaya ini juga bertujuan untuk menciptakan pemilu yang tidak hanya adil dan transparan, tetapi juga efisien serta inklusif, di mana setiap warga negara dapat berpartisipasi tanpa hambatan yang berarti. Dengan demikian, KPU berperan penting dalam menjaga kelangsungan demokrasi di Indonesia melalui penyelenggaraan pemilu yang akuntabel dan berintegritas tinggi<sup>6</sup>.

Partisipasi politik dalam pemilu menjadi indikator penting bagi kualitas demokrasi suatu negara. Partisipasi politik adalah keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik, baik melalui pemilu, aktivitas partai politik, maupun kegiatan politik lainnya yang bertujuan untuk memengaruhi kebijakan

---

<sup>5</sup> Pemerintah Pusat Indonesia, “Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum” (2017).

<sup>6</sup> Anwar Alaydrus, Jamal, dan Niken Nurmiyati, *Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi* (Adab CV.Adanu Abimata, 2023).

publik<sup>7</sup>. Tingkat partisipasi pemilih sering kali digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan suatu pemilu, di mana semakin tinggi partisipasi, semakin kuat legitimasi hasil pemilu tersebut. Partisipasi yang tinggi juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran politik yang baik serta memahami pentingnya peran mereka dalam menentukan arah kebijakan negara. Di sisi lain, rendahnya partisipasi pemilih dapat mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap sistem politik, apatisme, atau kurangnya akses informasi yang memadai<sup>8</sup>.

Pada Undang - Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan, pemuda adalah warga negara indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 17 (tujuh belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Dalam konteks pemilih muda, partisipasi politik mereka dalam pemilu menjadi perhatian khusus karena generasi muda memiliki potensi besar dalam menentukan arah masa depan bangsa. Pemilih muda di Indonesia yang terdiri dari kelompok usia 17 hingga 30 tahun, merupakan segmen pemilih yang cukup signifikan dari total populasi pemilih. Kelompok ini memiliki karakteristik yang unik, dengan latar belakang sosial, pendidikan, dan akses informasi yang berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya.

---

<sup>7</sup> Ni Ketut Arniti, "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 2 (2020): 329, <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>.

<sup>8</sup> Anwar, Rofik. Partisipasi Politik Santri Pemilih Pemula di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Pilpres. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2014

Sebagai generasi yang lahir dan tumbuh di era digital, pemilih muda cenderung lebih terbuka terhadap berbagai pandangan politik. Namun pada saat yang sama mereka juga menghadapi tantangan dalam mengolah informasi yang begitu melimpah di era media sosial. Oleh karena itu, pemahaman terhadap preferensi politik, motivasi, dan hambatan yang dihadapi oleh pemilih muda menjadi penting untuk menjamin partisipasi aktif mereka dalam proses pemilu<sup>9</sup>.

Pemilih pemula yang saat ini mendominasi DPT Kota Jambi pada pemilu 2024. Pada pemilu tahun 2019 Provinsi Jambi menetapkan jumlah DPT sebanyak 2.410.660 orang. Sedangkan DPT di Kota Jambi sebanyak 396.082 pada pemilu tahun 2019. Dengan meningkatnya jumlah DPT tersebut, partisipasi pemilih pemula terhadap penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 lebih mendominasi dari pada tahun sebelumnya. Pada penyelenggaraan pemilu tahun ini masih ada permasalahan penyelenggara pemilu dalam proses administrasi terhadap pemilih pemula. Pada sebelum pemilihan umum 2024 diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum diperiksa Oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Jambi mencatat ada sebanyak 18.272 pemilih pemula yang masuk dalam DPT Komisi Pemilihan Umum namun belum ada rekam e-KTP<sup>10</sup>.

Sedangkan di Kota Jambi menetapkan dalam DPT yang berhak mendapatkan hak pilihnya sebanyak 451.723 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 222.497 laki-laki dan 229.226 perempuan. Terhadap pemilih muda

---

<sup>9</sup> Tomsom Sabungan Silalahi, *Pemuda Milenial* (CV. Jejak, 2019).

<sup>10</sup> Ferdi Almunanda, "Pemilih Pemula Di Jambi Masuk DPT KPU Tapi Belum Rekam E-KTP," 2024, <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7188914/18-272-pemilih-pemula-di-jambi-masuk-dpt-kpu-tapi-belum-rekam-e-ktp>.

yang termasuk dalam DPT tersebut pada pemilih muda yang ada di Kota Jambi sebanyak 51.646 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 26.342 laki-laki dan 25.304 perempuan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi telah menetapkan daftar pemilih tetap yang berhak menyampaikan hak politiknya sebanyak 2.676.107 orang pemilih pada pemilihan umum 2024. Dari jumlah tersebut pemilih kelahiran 1981-1996 sebanyak 880.231 pemilih atau sekitar 32,89%, sedangkan generasi dari 1965-1980 itu sebanyak 830.878 pemilih atau sekitar 31,05%<sup>11</sup>. (*Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi*)

Tingginya jumlah pemilih muda menunjukkan bahwa mereka memiliki peran strategis dalam menentukan arah politik di Kota Jambi, termasuk di lingkungan pondok pesantren, yang menjadi bagian dari kelompok pemilih dengan karakteristik dan latar belakang pendidikan yang unik. Dalam konteks pemilih muda di pondok pesantren menjadi salah satu Yayasan yang menarik untuk dikaji, terutama dalam hal pembentukan partisipasi politik santri. Pondok pesantren sebagai Yayasan tradisional Islam di Indonesia telah menjadi bagian integral dari sistem pendidikan dan budaya masyarakat<sup>12</sup>. Pondok pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk budaya tradisional santri dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks sosial dan politik<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> Administrator, "KPU Provinsi Jambi Tetapkan DPT 2.676.107 Pemilih Pemula 2024," 2024, n.d., <https://jambi.antaranews.com/berita/569265/kpu-provinsi-jambi-tetapkan-dpt-2676107-pemilih-pemilu-2024>. Diakses pada 31 Mei 2024

<sup>12</sup> Dhofier, Zamakhsyaari. (1983). *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Tuan Guru*. Jakarta:

<sup>13</sup> Imam Syafe'i, "Mastuhu, 1994," *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. I (2017): 61–82.

Salah satu Yayasan perguruan yang menjadi objek penelitian ini adalah Pondok Pesantren As'ad di Kota Jambi. Pondok Pesantren As'ad memiliki peran penting dalam membina generasi muda, terutama santri-santri yang akan menjadi pemilih pada Pemilu 2024. Sebagai Yayasan Perguruan yang memiliki sejarah panjang dalam pendidikan Islam, Pondok Pesantren As'ad juga menganut aliran Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) sebuah aliran Islam yang moderat dan menghargai nilai-nilai kebersamaan, toleransi, serta keseimbangan dalam menjalankan ajaran agama.

Aliran Aswaja yang dianut oleh Pondok Pesantren As'ad mengajarkan pentingnya menjalankan kehidupan beragama yang moderat, jauh dari sikap ekstrem, serta menekankan pada pentingnya menjaga keharmonisan antara agama dan kehidupan sosial-politik<sup>14</sup>. Santri yang di didik di bawah ajaran Aswaja diharapkan menjadi pribadi yang mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal keterlibatan mereka dalam kehidupan politik<sup>15</sup>. Tantangan yang dihadapi oleh santri yang menganut aliran Aswaja dalam bidang politik yaitu bagaimana mereka dapat tetap berpegang pada nilai-nilai moderasi dan keharmonisan di tengah dinamika politik yang sering kali penuh dengan ketegangan dan konflik kepentingan. Selain itu, di lingkungan pondok pesantren yang umumnya sangat terikat pada nilai-nilai tradisional, terdapat tantangan dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan

---

<sup>14</sup> Haidar, M. A. (1994). *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia: pendekatan fikih dalam politik*. PT Gramedia Pustaka Utama.

<sup>15</sup> Universitas Islam, "Aswaja An-Nahdhiyah Sebagai Modal Sosial Dalam Mengokohkan Nkri," *Al-Ashr Jurnal Pendidikan Dan Pengembangan Dasar* 1, no. 2 (2016): 174–87.

partisipasi politik modern yang mengedepankan keterlibatan aktif dalam pemilu dan proses politik lainnya.

Namun selain itu, ada tantangan dalam memisahkan antara pandangan agama dan pandangan politik. Dalam tradisi Aswaja, agama dan politik sering kali dianggap sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan sepenuhnya, tetapi juga harus diperlakukan dengan hati-hati agar tidak terjadi politisasi agama. Hal ini dapat menjadi dilema bagi santri yang ingin berpartisipasi aktif dalam politik tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip keagamaan yang diajarkan di pondok pesantren. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan melihat bagaimana santri di Pondok Pesantren As'ad memandang peran mereka sebagai pemilih dalam konteks politik modern Indonesia dan bagaimana nilai-nilai Aswaja memengaruhi sikap politik mereka.

Penelitian ini berfokus pada analisis partisipasi pemilih muda, khususnya santri di Pondok Pesantren As'ad dalam Pemilu 2024. Pemilihan pondok pesantren ini sebagai lokasi penelitian didasarkan pada fakta bahwa pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda, terutama dalam konteks pendidikan agama dan sosial. Pondok Pesantren As'ad juga terletak di Kota Jambi, sebuah kota yang berkembang dengan dinamika politik lokal yang cukup kompleks. Dengan jumlah santri sebanyak 552 dari jumlah tersebut para santri yang telah mendapatkan hak politiknya sebanyak 251 laki-laki dan 301 perempuan. Pondok Pesantren As'ad memiliki potensi yang signifikan dalam memberikan kontribusi pada partisipasi politik pemilih muda di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan permasalahan diatas, peneliti merasa yakin dan tertarik melakukan penelitian ini karena berkaitan dengan partisipasi pemilih muda dalam pemilu tahun 2024 pada pondok pesantren as'ad di kota jambi. Melalui penelusuran terhadap peneliti sebelumnya, maka penulis dapat menemukan berbagai karya ilmiah yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Pada penelitian terdahulu tersebut dimaksud menafsirkan tentang posisi penelitian ini yang berkaitan terhadap studi penelitian yang serupa. Maka dari itu penulis mencantumkan beberapa penelitian yang terdahulu sebagai berikut :

Penelitian pertama yang ditulis oleh Agam Primadi dkk (2019) meneliti tentang Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif. Metode yang digunakan dalam peneliti ialah metode deskriptif analitis, dengan menggunakan data primer yang didapatkan dari aktivitas partisipatif peneliti. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa inovasi diwujudkan melalui program kelas pengawasan pemilu dengan membentuk agen pengawasan pemilu partisipatif di setiap kecamatan. Dengan melalui program tersebut terbukti sangat efektif dalam meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik pemilih, terutama dalam kalangan pemilih pemula<sup>16</sup>.

Penelitian kedua, Marno Wance & Bakri La Suhu (2019) meneliti tentang Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menentukan Pilihan Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Maluku Utara. Berdasarkan penelitian ini menggunakan metode

---

<sup>16</sup> Agam Primadi, David Efendi, and Sahirin Sahirin, "Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif," *Journal of Political Issues* 1, no. 1 (2019): 63–73, <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.7>.

deskriptif kualitatif, dengan menggunakan sumber data yang melalui observasi, wawancara dan dokumen. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Tingkat partisipasi politik Pemilih Pemula dalam menentukan pilihan pada pilkada di daerah Maluku Utara memutuskan pilihan dalam rasional dan menggunakan pendekatan emosional dengan kandidat yang menyalurkan hak suara pada pemilihan<sup>17</sup>.

Penelitian ketiga, Irma Clara Juliet Lengkoan dkk (2022) meneliti tentang Efektivitas Program Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum 2019 Di Kota Bitung. Pada penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah program relawan demokrasi ini meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum di Kota Bitung. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat relawan demokrasi dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat selama proses pemilihan umum. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini fokus pada efektivitas program relawan demokrasi dalam mendorong partisipasi masyarakat pada pemilu 2019 di Kota Bitung<sup>18</sup>.

Penelitian keempat, Iskandar dkk (2024) meneliti tentang Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pelajaran SMP/SMA di Desa Gunung Sari Pondok Pesantren Fatimah Az Zahrag Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini

---

<sup>17</sup> Marno Wance and Bakri La Suhu, "Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menentukan Pilihan Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Maluku Utara," *Journal Of Government (JOG) Kajian Manajemen Pemerintahan Dan Otonomi Daerah* 4, no. 2 (2019): 91–114.

<sup>18</sup> Irma Clara et al., "Efektivitas Program Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum 2019 Di Kota Bitung," *Jurnal Governance* 2, no. 1 (2022): 2022.

menunjukkan bahwa pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Kaltarayang pada akhirnya dapat menjadi salah satu pedoman dalam pelaksanaan pendidikan politik di sekolah pada umumnya dan khususnya di lingkungan SMP/SMA pada khususnya Desa Gunung Sari Kabupaten Bulungan. Dengan terselenggaranya pendidikan politik di sekolah yang baik, dapat diharapkan terbentuk generasi muda penerus bangsa yang memiliki kesadaran politik dan mampu mengembangkan suasana politik yang selaras dengan nilai-nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara<sup>19</sup>.

Penelitian kelima oleh Moh Syamsul Hadi & Zamroni meneliti tentang Pendidikan Politik Dan Partisipasi Pemilu Di Pesantren: Perspektif Nilai-Nilai Pendidikan Islam. Pada penelitian ini menggunakan metode non-interaktif karena tidak mengumpulkan data dari hasil interaksi dengan manusia sehingga jenis penelitian ini berupa metode deskriptif dan studi literatur. Dalam penelitian ini nilai-nilai pendidikan Islam seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan partisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat diselaraskan dengan proses pendidikan politik di pesantren. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pendidikan politik di pesantren, yang berlandaskan pada ajaran Islam, mendorong keterlibatan aktif pesantren dalam pemilu. Santri dibekali pemahaman tentang isu-isu politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam serta dilatih untuk berpartisipasi aktif dalam mempengaruhi kebijakan publik

---

<sup>19</sup> Muhammad David, Yoga Bestari, and Panggih Nur Adi, "Implementasi Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi," *Civitas (Jurnal Pembelajaran Dan Ilmu Civic)* 6, no. 1 (2020): 8–17, <https://doi.org/10.36987/civitas.v1i1.1665>.

dan proses pemilihan. Temuan penelitian ini memberikan wawasan berharga mengenai bagaimana pendidikan politik berbasis nilai Islam di pesantren dapat membentuk partisipasi politik yang berkualitas di kalangan santri. Pada akhirnya, hal ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap proses demokrasi dan stabilitas politik di Indonesia<sup>20</sup>.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, maka peneliti ingin mencoba menghadirkan sudut pandang yang baru ditengah beberapa penelitian terdahulu yang sudah ada terkait partisipasi pemilih muda di lingkup pondok pesantren dalam pemilu tahun 2024. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam terkait **“ANALISIS PARTISIPASI POLITIK SANTRI PADA PEMILU TAHUN 2024 (Studi kasus pada Pondok Pesantren As’ad di Kota Jambi)”** penelitian ini akan menggunakan pendekatan teori partisipasi politik dari Mariam Budiarjo dalam konteks partisipasi politik Pemilih Muda. Pendekatan ini juga menjadi pembeda utama dari penelitian sebelumnya.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, hak politik Pemilih Muda sangat penting, sebagai sebuah awalan proses dalam perencanaan pemilu. Kajian ini merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

---

<sup>20</sup> Moh Syamsul Hadi and zamroni, “Pendidikan Politik Dan Partisipasi Pemilu Di Pesantren: Perspektif Nilai-Nilai Pendidikan Islam,” *Maktabah Borneo, Jurnal Pengembangan Belajar Dan Pembelajaran Pendidikan Agama II* (2023): 35–54.

1. Bagaimana partisipasi politik santri di pondok pesantren As'ad Kota Jambi pada pemilu Tahun 2024?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik santri di pondok pesantren As'ad Kota Jambi pada pemilu Tahun 2024?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah peneliti uraikan diatas, maka Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi politik santri di Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi pada pemilu tahun 2024.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi partisipasi politik santri di pondok pesantren As'ad Kota Jambi pada pemilu tahun 2024.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dengan ada nya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teortis

Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi dan penambah wawasan dalam kajian di bidang Ilmu Politik serta tambahan ilmu pengetahuan dalam Analisis Partisipasi Politik Santri Pada Pemilu Tahun 2024 Di Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi. Serta dapat membantu para peneliti selanjutnya dengan menjadikan penelitian ini sebagai salah satu referensi.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengidentifikasi partisipasi politik santri di Pondok Pesantren As'ad, merumuskan solusi untuk memastikan bahwa kelompok pemilih muda dapat berkontribusi secara maksimal dalam proses pemilu dan meningkatkan kesadaran politik mereka, sehingga tercipta pemilih yang lebih kritis, cerdas, serta memiliki tanggung jawab dalam menentukan masa depan bangsa melalui hak pilih yang mereka miliki.

### **1.5. Landasan Teori**

Dalam kajian ini peneliti mencantumkan Teori Partisipasi Politik Menurut Miriam Budiarjo dan Teori Hak Politik Menurut Ramlan Surbakti beserta indikator sebagai berikut:

#### **1.5.1. Partisipasi Politik**

##### 1) Definisi Partisipasi Politik

Miriam Budiarjo mendefinisikan partisipasi politik sebagai bentuk keterlibatan individu atau kelompok dalam aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk memengaruhi keputusan politik yang diambil oleh pemerintah atau lembaga politik lainnya. Keterlibatan ini dapat berlangsung secara langsung, melalui tindakan seperti memberikan suara dalam pemilu, atau secara tidak langsung, melalui bentuk keterlibatan yang tidak melibatkan kontak langsung dengan proses pengambilan keputusan, seperti diskusi politik atau protes.

Menurut Budiarjo, partisipasi politik adalah elemen yang sangat penting dalam sistem demokrasi, karena memberikan kesempatan bagi warga negara untuk berperan aktif dalam menentukan arah kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka. Partisipasi politik juga memperkuat legitimasi pemerintahan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat secara luas<sup>21</sup>.

2) Elemen Kunci dalam Partisipasi Politik Menurut Miriam Budiarjo:

a. Aktivitas yang Dilakukan oleh Warga Negara

Partisipasi politik mencakup berbagai aktivitas yang dilakukan oleh warga negara untuk ikut serta dalam proses politik. Ini bisa berupa tindakan seperti memberikan suara dalam pemilu, mengikuti kampanye politik, mengajukan petisi, atau terlibat dalam diskusi politik.

b. Tujuan untuk Memengaruhi Keputusan Politik

Tujuan utama partisipasi politik adalah untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan politik, baik secara langsung (seperti memilih pemimpin) atau tidak langsung (melalui protes atau diskusi). Aktivitas ini didorong oleh keinginan untuk memengaruhi kebijakan publik yang berdampak pada masyarakat.

---

<sup>21</sup> Achmad Zulfikar, "Partisipasi Pemuda Di Tahun Politik," no. Mdi (2018): 1–4, <https://doi.org/10.31227/OSF.IO/7DBTR>.

c. Partisipasi Bersifat Sukarela

Miriam Budiarjo menekankan bahwa partisipasi politik harus bersifat sukarela. Setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan terlibat atau tidak dalam aktivitas politik. Partisipasi yang dipaksakan, seperti yang terjadi di negara-negara otoriter, tidak mencerminkan esensi demokrasi.

d. Beragam Bentuk Partisipasi

Partisipasi politik tidak terbatas pada satu bentuk saja. Selain memberikan suara dalam pemilu, bentuk partisipasi lainnya termasuk mengikuti diskusi politik, bergabung dengan partai politik atau kelompok kepentingan, menyuarakan pendapat melalui media, atau melakukan aksi protes.

3) Indikator Partisipasi Politik

a. Partisipasi dalam pemilu

Partisipasi dalam pemilu adalah salah satu indikator partisipasi politik yang paling penting. Dalam konteks pondok pesantren, indikator ini mengukur sejauh mana santri menggunakan hak pilih mereka ketika pemilu diadakan, baik pemilu presiden, legislatif, atau pilkada.

b. Keterlibatan dalam diskusi politik

Diskusi politik adalah salah satu cara penting dalam membentuk kesadaran dan sikap politik. Dalam pesantren, keterlibatan santri dalam diskusi politik bisa terjadi di berbagai

forum, baik formal maupun informal terkait dengan isu-isu politik nasional, kebijakan pemerintah, atau bahkan masalah-masalah internasional yang relevan dengan umat Islam.

c. Pengaruh dalam pemahaman politik

Pondok pesantren memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan sikap dan pemahaman politik santri. Di dalam lingkungan pesantren, pendidikan yang diberikan bisa mencakup nilai-nilai demokrasi, kewarganegaraan, serta perspektif Islam tentang politik.

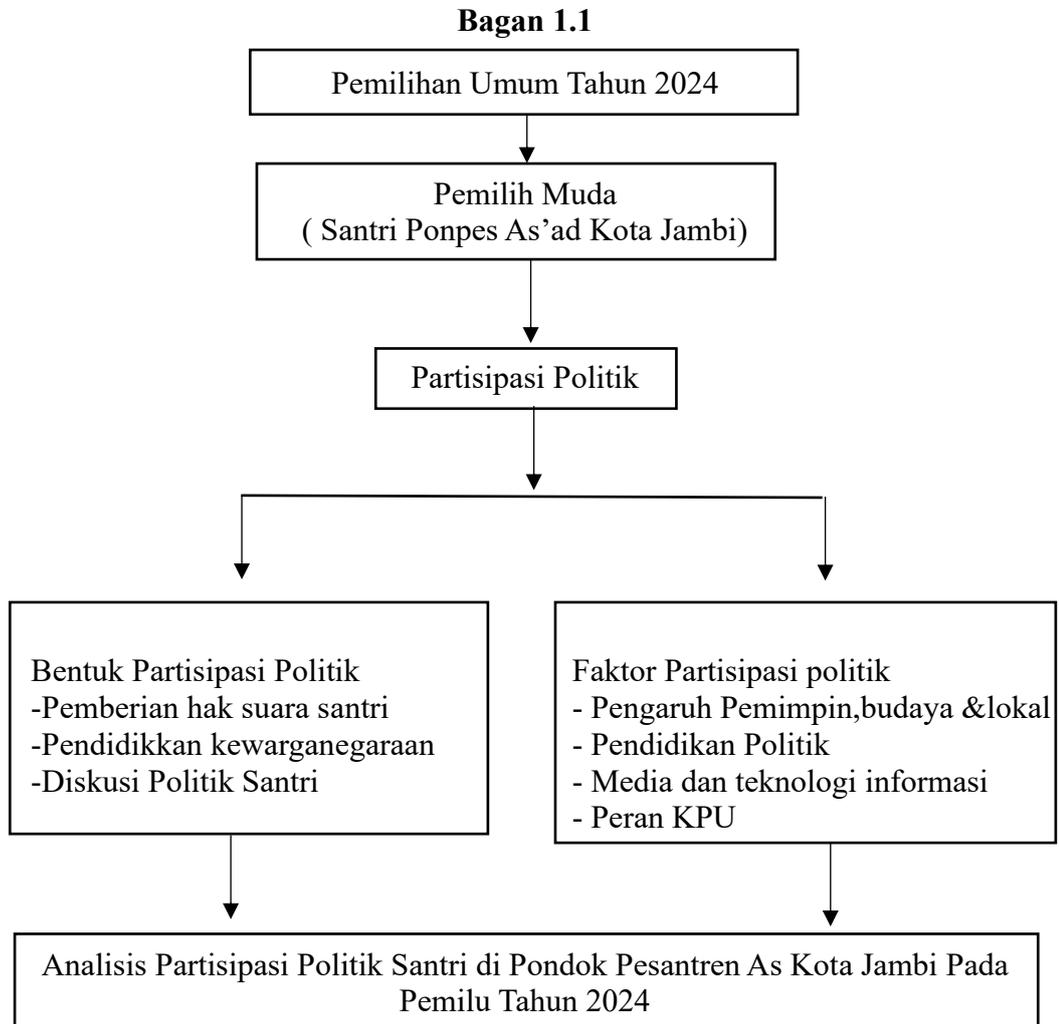
d. Pemahaman tentang hak politik dan kewarganegaraan

Pemahaman santri tentang hak-hak politik mereka sebagai warga negara, seperti hak memilih, hak mengemukakan pendapat, dan hak untuk berpartisipasi dalam proses politik lainnya. Ini juga mencakup pemahaman tentang kewajiban mereka sebagai warga negara, seperti mematuhi hukum, berpartisipasi dalam pembangunan, dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

e. Pengaruh ulama atau pimpinan pesantren terhadap partisipasi politik

Ulama atau pimpinan pesantren memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk sikap politik santri. Nasihat dan pandangan politik dari pimpinan pesantren sering kali menjadi pedoman bagi santri dalam memutuskan bagaimana mereka akan berpartisipasi dalam politik.

## 1.5. Kerangka Pikir



## 1.6. Metode Penelitian

### 1.7.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode jenis penelitian kualitatif. Menurut Moleong yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk menafsirkan fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah<sup>22</sup>.

Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena sosial dalam konteks yang lebih mendalam. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berfokus pada pemahaman makna, pengalaman, dan pandangan dari individu atau kelompok yang diteliti. Metode ini sering kali menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Sugiyono menekankan pentingnya konteks dalam penelitian kualitatif, di mana peneliti harus memahami latar belakang dan lingkungan sosial subjek untuk mendapatkan gambaran yang utuh. Kelebihan dari metode ini adalah kemampuannya untuk menghasilkan data yang kaya dan mendalam, yang memungkinkan peneliti untuk menggali kompleksitas suatu fenomena.

Dalam bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk penelitian deskriptif. Bentuk penelitian ini berusaha mendeskripsikan suatu gejala, atau fenomena dari peristiwa yang terjadi. Berdasarkan masalah penelitian diatas, peneliti menggunakan bentuk penelitian deskriptif. Hal ini disebabkan peneliti menganalisis Partisipasi Bagi Pemilih Muda Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kota Jambi.

Metode analisis dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, atau riwayat. Biasanya mengacu pada masalah sosial dan keadaan realistis atau lingkungan alam yang mencakup

---

<sup>22</sup> S.Pd Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Jejak, 2018).

semua. Penelitian kualitatif memberi kita kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang suatu fenomena, faktor-faktor yang menyebabkannya, dan potensi solusinya. Metode ini mampu memberikan penjelasan menyeluruh tentang hak politik pemilih muda dalam mewujudkan partisipasi pemilih muda dalam pemilu kedepannya.

### **1.7.2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian didefinisikan sebagai lokasi atau area yang digunakan peneliti untuk melakukan proses pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan di yayasan Pondok Pesantren As'ad terkait dengan fenomena melihat partisipasi santri yang terdapat dalam lingkup Pesantren As'ad. Pemilihan Pondok Pesantren As'ad di Kota Jambi sebagai lokasi penelitian ini didasarkan pada beberapa alasan strategis dan signifikan.

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang memiliki karakteristik unik, di mana banyak pemilih muda yang sedang berada dalam tahap awal kematangan politik mereka. Lingkungan pondok pesantren yang seringkali terpisah dari kehidupan sehari-hari masyarakat umum dan memiliki sistem sosial yang khas memberikan konteks yang menarik untuk memahami bagaimana pemilih muda menjalani hak politik mereka.

### **1.7.3. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah menyoroti partisipasi pemilih muda pondok pesantren as'ad di Kota Jambi pada saat pemilu dilaksanakan. Selain itu juga memfokuskan faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik santri Pondok Pesantren As'ad di Kota Jambi.

#### **1.7.4. Sumber Data**

Sumber data adalah istilah yang mengacu pada sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menyelesaikan masalah penelitian. Jumlah sumber data yang diperlukan bervariasi tergantung pada jumlah data yang diperlukan dan seberapa lengkap data tersebut untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sumber data yang biasanya dikumpulkan oleh peneliti yang menerapkan metode penelitian kualitatif berasal dari berbagai referensi. Sumber data ini dapat diperoleh dari :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya informan, yaitu para santri/i yang telah mencakupi sesuai syarat pemilu dengan usia 17-30 tahun di Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi, Pengurus/Guru Pondok Pesantren As'ad, dan Pihak Anggota Sekretariat Sub bagian Perencanaan, Data, dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jambi

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi, artikel, situs Web, internet serta berbagai referensi mengenai DPT melalui Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.

### 1.7.5. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive *sampling*, sebagaimana dimaksud yang yang disampaikan oleh Sugiyono adalah : “Purposive *sampling* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.”<sup>23</sup>. Terkait Penentuan dalam penelitian ini meliputi beberapa karakteristik santri yaitu:

1. Santri/Santriwati yang telah berumur 17 tahun
2. Santri/Santriwati yang telah memiliki hak pilihnya
3. Santri/Santriwati yang bersifat moderat
4. Santri/Santriwati yang aktif di pesantren as’ad
5. Santri/Santriwati yang perusasif dalam memberi argumentasi
6. Santri/Santriwati konstruktif dalam berpikir

Dari beberapa karakteristik diatas terdapat 7 informan santri/i yang telah sesuai dari karakteristik tersebut sebagai berikut:

**Tabel. 1.1**  
**Data Informan**

No	Informan	Nama	Keterangan
----	----------	------	------------

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kauntitatif, Kualitatif, Dan R&D* (CV Saba Jaya Publisher, 2018).

1	Santri/i Pemilih muda di Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dina Serlyana (18Thn, kls XII)</li> <li>2. Ardina Resti (17Thn, kls XI)</li> <li>3. Isratul (18Thn, kls XII)</li> <li>4. Fadhil Husni Al Mubarok (18Thn, kls 12)</li> <li>5. Ahmad Fadli (17Thn, kls 11)</li> <li>6. Muhammad Wawan (18Thn, kls 12)</li> <li>7. Zaky Miftahurrahman (18Thn, kls 12)</li> </ol>	Santriwati dan Santri
2	Guru/ Pengasuh di Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi	Kamilin, S. Pdl	Sekretaris Yayasan Pondok Pesantren As'ad 2
3	Staff Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jambi Kepala Sub	MHD. Rasyid Adil, S.E	Informan

	Bagian Teknis dan Humas		
--	----------------------------	--	--

### 1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengemukakan data dalam penelitian Analisis Partisipasi Politik Santri Pada Pemilu tahun 2024 dengan locus Pondok Pesantren As'ad di Kota Jambi. Dibutuhkan wawancara dan observasi untuk mendapatkan informasi data yakni sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap partisipan dan konteks yang terlibat dalam fenomena penelitian. Observasi dapat dilakukan dalam situasi nyata atau di lingkungan yang telah dirancang secara khusus untuk penelitian.

b. Wawancara

Wawancara yakni teknik pengumpulan data dengan mengkaji pertanyaan secara langsung dan pertemuan secara langsung oleh pengumpul data kepada responden, peneliti bisa mendapatkan informasi mendalam tentang topik yang diteliti. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorai pandangan, pengalaman dan persepsi responden secara langsung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mencakup pengumpulan informasi yakni laporan, tulisan dan gambaran

dalam analisis partisipasi politik santri. Teknik ini penting untuk melengkapi data yang diperoleh melalui metode lain, seperti wawancara atau observasi, sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif dan mendalam.

#### **1.7.7. Teknik Analisis Data**

Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa analisis data kualitatif bersifat iteratif. Artinya proses analisis dan pengumpulan data dapat terjadi secara simultan, memungkinkan peneliti untuk memodifikasi atau menyesuaikan fokus penelitian sesuai kebutuhan. Proses ini membutuhkan refleksi mendalam, interpretasi yang kontekstual, dan validasi data melalui triangulasi untuk memastikan keabsahan hasil penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data di lapangan model menurut Miles & Huberman. Menyampaikan bahwa teknik analisis data dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Reduksi Data, Setelah mendapatkan data tahap selanjutnya yaitu menganalisis data tersebut melalui reduksi data, mereduksi data yaitu merangkum, memilih dan memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari temanya dan polanya.
- b. Penyajian Data, Dalam penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif/kata-kata dan mudah dipahami.

- c. Simpulan atau verifikasi, Selanjutnya peneliti membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah diproses melalui reduksi data dan pemaparan data.

#### **1.7.8. Keabsahan Data**

Dalam penelitian kualitatif setelah penarikan kesimpulan langkah berikutnya adalah memastikan keabsahan data. Menurut Sugiyono, menyatakan bahwa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk membuktikan validitas atau keakuratan data yang diperoleh di lapangan. Sebuah hasil data penelitian dapat dianggap “valid” apabila data tersebut menunjukkan kebenaran yang selaras dengan hasil yang diperoleh di lapangan.

Uji keabsahan data dapat menggunakan Triangulasi sebagai metode dalam keabsahan dan kebenaran suatu data. Triangulasi dapat dipahami sebagai uji keabsahan data dari sumber dan cara yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang akurat. Terdapat tiga tipe triangulasi, yaitu :

- a. Triangulasi Sumber, memvalidasi keabsahan data dengan melibatkan penggunaan berbagai sumber data untuk memastikan keakuratan dan keabsahan informasi. Setelah peneliti menganalisis data, maka tersebut akan menghasilkan kesimpulan yang kemudian dapat dimintai persetujuan (*member check*) dengan ketiga sumber data tersebut.
- b. Triangulasi teknik, teknik memastikan keabsahan data dengan cara menguji terhadap kesesuaian sumber data dengan perbedaan teknik.

Sehingga ini seperti menguji data hasil wawancara yang kemudian diverifikasi data dengan melihat konsistensi hasil yang diperoleh dari berbagai sumber atau metode yang berbeda, sehingga meningkatkan akurasi dan kredibilitas temuan penelitian.

- c. Triangulasi Waktu, memvalidasi data dengan membandingkan informasi yang diperoleh pada waktu yang berbeda. Proses pengumpulan data yang dilaksanakan pada saat informan menguasai data sehingga data akurat dan akan menghasilkan data yang akurat. Uji kebasahan data dapat dilakukan melalui *wawancara*, pengamatan maupun cara lainnya di waktu yang berbeda. Apabila hasil uji menunjukkan adanya perbedaan data, maka proses pengujian data dapat diulangi hingga ditemukan data yang kredibel dan relevan.